



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
 Reviewed : 11/10/2024
 Accepted : 16/10/2024
 Published : 28/10/2024

Martino Bijeloys
 Siagian¹
 Christian Johansen
 Sihombing²
 Reyvaldo Gilbert
 Sitinjak³

PENTINGNYA PENGETAHUAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perkembangan sejarah Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan analisis, studi ini menelusuri evolusi Pancasila dari konsepsi awal hingga perannya sebagai dasar negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah mengakar dalam budaya Nusantara, dirumuskan melalui para pendiri bangsa. Sejak era kemerdekaan hingga reformasi, mencerminkan perubahan lanskap politik dan sosial Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa yang beragam. Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman historis Pancasila. Analisis juga mengungkapkan bagaimana Pancasila telah berperan dalam membentuk kebijakan nasional dan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Penelitian ini berfokus pada sebuah studi perkembangan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga periode reformasi. Dalam mengumpulkan data yang relevan, digunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif Lebih lanjut. Kesimpulannya, kajian sejarah Pancasila memberi fondasi penting bagi upaya menjaga integritas dan identitas nasional negara Indonesia di tengah arus globalisasi.

Kata kunci: Pengetahuan ; Pancasila ; Kajian ; Sejarah ; Bangsa

Abstract

This research examines the historical development of Pancasila in the context of the history of the Indonesian nation. Using historical research methods and analysis, this study traces the evolution of Pancasila from its initial conception to its role as the foundation of the Indonesian state. The results show that Pancasila is a value that has been rooted in the culture of the archipelago, formulated through the founding fathers. From the era of independence to reformation, it reflects the changing political and social landscape of Indonesia. Despite facing various challenges, Pancasila remains the unifier of a diverse nation. This study highlights the importance of a historical understanding of Pancasila. The analysis also reveals how Pancasila has played a role in shaping national policy and maintaining a balance between tradition and modernity. This research focuses on a study of the development of Pancasila as an ideology and foundation of the state, from the pre-independence period to the reform period. In collecting relevant data, the historical method with a qualitative approach was used. In conclusion, the study of the history of Pancasila provides an important foundation for efforts to maintain the integrity and national identity of the Indonesian state in the midst of globalization.

Keywords: Knowledge ; Pancasila ; Study ; History ; Nation

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Sebagai hasil konsensus para pendiri bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

^{1,2,3} Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan
 email: martinobijeloysisagian123@gmail.com, jsihombing896@gmail.com, juandaalex99@gmail.com

Kajian tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan bangsa ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi, dan peranannya dalam membentuk identitas serta karakter bangsa (Halking, 2024). Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila menjadi pedoman dalam sikap, tindakan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan identitas nasional dan semangat kebangsaan yang menekankan persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jauh sebelum Pancasila diusulkan sebagai dasar negara, cikal bakal ideologi bangsa Indonesia sudah mulai terbentuk dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka menuju pintu gerbang kemerdekaan. Melihat sejarah panjang perumusan dan pengukuhan Pancasila, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengetahuan tentang sejarah Pancasila tidak hanya membantu masyarakat memahami konteks kelahirannya tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial yang terus berubah, pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap relevan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Taufiqurrahman, 2018). Pancasila terdiri dari lima sila, yang masing-masing mengandung nilai-nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama ada Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menghargai keberagaman agama dan kepercayaan, serta menekankan pentingnya kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati. Yang kedua ada Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Nilai ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Keadilan dan peradaban harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dalam kebijakan negara. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia, Nilai persatuan menekankan pentingnya kesatuan bangsa, di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila mengajarkan bahwa integrasi nasional harus selalu dijaga demi keutuhan NKRI. Yang keempat ada Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Nilai ini mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan harus didasarkan pada demokrasi, yang menjamin partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya. Yang kelima ada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nilai keadilan sosial menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Pancasila mengajarkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak menikmati kemakmuran dan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi. Kelima sila ini saling melengkapi dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan tujuan luhur bangsa Indonesia untuk hidup dalam keadilan, persatuan, dan kesejahteraan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam konteks sejarah nasional. Penelitian ini berfokus pada proses perumusan Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI, hingga pengesahannya sebagai ideologi negara yang menjadi landasan moral, politik, dan sosial bangsa Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan dinamika penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa (Djoened, 2008).

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Penelitian mengenai perkembangan sejarah Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia memiliki beberapa manfaat penting. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya kajian ilmiah mengenai ideologi Pancasila, sebagaimana diuraikan oleh (Kaelan, 2010) dalam Pendidikan Pancasila, di mana dijelaskan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai sejarah dan filosofis Pancasila penting untuk menjaga konsistensi ideologi ini dalam menghadapi dinamika global dan nasional. Pemahaman yang baik tentang perkembangan sejarah Pancasila akan membantu memperkuat pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan dan mendorong pembentukan karakter generasi muda Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dan analisis. Sumber utama untuk penulisan artikel ini berasal dari buku, antara lain yaitu (a) Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi (panduan pembelajaran mata kuliah) oleh Drs. Halking, M Si, (b) Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi oleh Taufiqurrahman pembelajaran dan Kemahasiswaan.(c) Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran Jilid 6: Zaman Jepang dan Zaman Republik oleh Marwati Djoened Poesponegoro Sejarah Nasional (d) Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila oleh Yudi Latif

Penelitian sejarah bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu guna memahami dan menganalisis pengaruhnya terhadap perkembangan masa kini. Metode penelitian sejarah melibatkan proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun kembali data dari berbagai sumber historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI (29 Mei- 1 Juni 1945). BPUPKI sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada 7 September 1944, yang mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan "pada masa depan". Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap: pertama melalui BPUPKI kemudian disusul dengan pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas BPUPKI hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, sementara tugas penyusunan rancangan dan penetapan UUD menjadi kewenangan PPKI. Tetapi, skenario ini berubah karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas.

Jumlah keanggotaan badan ini semula 63 orang, kemudian bertambah menjadi 69 orang. Jepang membagi anggota BPUPKI menjadi lima golongan: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, wali kota), dan golongan peranakan: peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Tidak semua anggota BPUPKI ini terdiri dari kaum pria, karena ada 2 orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito). Oleh karena itu, istilah founding fathers tidaklah tepat. Alhasil, meskipun struktur keanggotaan BPUPKI ini tidak memuaskan semua kalangan, unsur-unsur perwakilannya cukup merepresentasikan keragaman golongan sosial politik yang ada di Indonesia pada masa itu.

Dalam merespons permintaan Radjiman mengenai dasar negara Indonesia, sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni, anggota-anggota BPUPKI lainnya telah mengemukakan pandangannya. Pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Abdoelrachim Pratalykrana, Abdul Kadir, K.H. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo, dan Mohammad Hatta. Pentingnya nilai kemanusiaan sebagai fundamen kenegaraan antara lain dikemukakan oleh Radjiman Wediodiningrat, Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Wongsonagoro, Soepomo, Liem Koen Hian, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Pentingnya nilai persatuan sebagai fundamen

kenegaraan dikemukakan antara lain oleh Muhammad Yamin, Sosrodingrat, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerio, dan Seosanto Tirto Prodjo, A. Rachim Pratalykrana, dan Soekiman, Abdul Kadir, Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Pentingnya nilai-nilai demokrasi permusyawaratan sebagai fundamen kenegaraan antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Woerjaningrat, Soesanto Tirto Prodjo, Abdoelrachim Pratalykrana, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan Soepomo. Pentingnya nilai-nilai keadilan/kesejahteraan sosial sebagai fundamen kenegaraan dikemukakan antara lain oleh Muhammad Yamin, Soerio, Abdoelrachim Pratalykrana, Abdul Kadir, Soepomo, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Dengan demikian, tampak jelas bahwa secara substantif, semua prinsip dasar negara yang diajukan itu sama-sama diusung baik oleh mereka yang berasal dari golongan kebangsaan maupun dari golongan Islam (Latif, 2011).

Meski demikian, prinsip-prinsip yang diajukan itu masih bersifat serabutan, belum ada yang merumuskannya secara sistematis dan holistik sebagai suatu dasar negara yang koheren. Muhammad Yamin dan Soepomo barangkali agak mendekati apa yang diminta oleh Radjiman. Secara eksplisit atau implisit, Yamin dan Soepomo mengemukakan pentingnya prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan/kesejahteraan sebagai fundamen kenegaraan. Masalahnya, dalam kategorisasi yang dikemukakan oleh Yamin, tidak semua prinsip itu dia masukkan sebagai dasar negara. Dalam kategorisasinya, "permusyawaratan", "perwakilan", dan "kebijaksanaan" ("rasionalisme") disebut sebagai "dasar" ("dasar yang tiga"). Sementara itu, "kebangsaan", "kemanusiaan" dan "kesejahteraan" disebut sebagai "asas". Di bagian lain, "perwakilan" digolongkan sebagai "paham". Sedangkan "kerakhmatan Tuhan", tidak jelas ke mana dia golongkan. Selain itu, Yamin juga dalam uraiannya sering mencampuradukkan antara "dasar negara" dan "bentuk negara". Bahkan yang dimaksud Yamin dengan "Dasar Negara" juga termasuk "pembelaan negara", "budipekerti negara", "daerah negara", "penduduk dan putera negara", "susunan pemerintahan", dan bahkan tentang "hak tanah". Adapun dalam pernyataan Soepomo, prinsip-prinsip itu hanya disebutkan secara implisit dalam uraiannya mengenai aliran pikiran negara integralistik. Ketika dia menyebut istilah "dasar", yang dimaksudkannya malah dalam konteks bahwa "negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidé) negara yang integralistik", juga dalam konteks "dasar" kewarganegaraan dan "dasar" sistem pemerintahan. Alhasil, yang dimaksud dasar (dasar negara) oleh Yamin dan Soepomo bukanlah dalam pengertian "dasar falsafah" (philosophische grondslag).

Betapapun juga, pandangan-pandangan tersebut memberikan masukan penting bagi Soekarno dalam merumuskan konsepsinya. Masukan-masukan ini, yang dikombinasikan dengan gagasan-gagasan ideologisnya yang telah dikembangkan sejak 1920-an dan refleksi historisnya, mengkrystal dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya yang monumental itu, Soekarno menjawab permintaan Radjiman Wediodiningrat akan dasar negara Indonesia itu dalam kerangka "dasar falsafah" (philosophische grondslag) atau "pandangan dunia" (weltanschauung) dengan penjelasannya yang runtut, solid, dan koheren. Menurut pengakuannya di kemudian hari, pada malam menjelang 1 Juni, dia bertafakur, menjelajahi lapis demi lapis lintasan sejarah bangsa, menangkap semangat yang bergelora dalam jiwa rakyat, dan akhirnya menengadahkan tangan meminta petunjuk kepada Tuhan agar diberi jawaban yang tepat atas pertanyaan tentang dasar negara yang hendak dipergunakan untuk meletakkan Negara Indonesia merdeka di atasnya (Latif, 2011).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan. Keputusan ini diambil oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi di Konstituante, lembaga yang dibentuk setelah Pemilu 1955 untuk menyusun undang-undang dasar baru. Namun, perdebatan ideologis yang tajam, terutama antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis, mengakibatkan Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Soekarno, dengan dukungan militer, akhirnya mengambil langkah untuk mengembalikan Indonesia pada UUD 1945 sebagai konstitusi dasar, membubarkan Konstituante, dan memperkenalkan sistem Demokrasi Terpimpin.

Dalam Demokrasi Terpimpin, peran Presiden Soekarno menjadi semakin dominan. Sistem ini, yang berlaku dari 1959 hingga 1965, ditandai dengan meningkatnya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Soekarno menegaskan pentingnya "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai pilar persatuan bangsa, dan PKI (Partai Komunis Indonesia) menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia pada masa itu. Pemerintahannya banyak didukung oleh kaum intelektual dan partai-partai kiri, namun juga menghadapi tantangan dari militer dan kelompok-kelompok Islam yang melihat keberadaan PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas negara (Marwati, 2008).

Di sisi lain, sistem Demokrasi Terpimpin juga dikritik karena membatasi peran demokrasi parlementer dan kebebasan politik. Soekarno memegang kendali atas seluruh aspek politik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri, dan ini menciptakan kondisi di mana partisipasi politik masyarakat menjadi sangat terbatas. Kebijakan luar negeri yang anti-Barat serta hubungan dekat dengan Uni Soviet dan RRC juga menyebabkan Indonesia terisolasi secara diplomatik. Kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk dengan inflasi yang tinggi, ketidakstabilan harga, dan berkurangnya investasi asing.

Puncak dari ketegangan politik dan militer pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi dengan adanya peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965. Peristiwa ini membawa perubahan drastis dalam dinamika politik Indonesia. Jenderal Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih kekuasaan secara bertahap setelah peristiwa tersebut. Dengan dukungan militer dan kelompok anti-komunis, Soeharto menggulingkan Soekarno dan memulai era baru dalam sejarah Indonesia, yang dikenal sebagai Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998, Soeharto menerapkan kebijakan yang lebih represif dan otoriter. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan masyarakat. Orde Baru memusatkan kekuasaan pada presiden dan membatasi ruang gerak partai politik dan kebebasan pers. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada dekade 1970-an hingga 1980-an, yang didukung oleh melimpahnya pendapatan dari ekspor minyak dan gas.

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi, rezim Orde Baru juga dikenal karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Otoritarianisme Soeharto mulai mendapat tantangan serius pada awal 1990-an ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara. Krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 memperparah ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia. Inflasi melonjak tinggi, mata uang rupiah terjun bebas, dan angka pengangguran meningkat tajam. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menuntut reformasi politik semakin menguat. Pada Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.

Era Reformasi membawa angin segar dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi multipartai kembali diberlakukan, kebebasan pers dipulihkan, dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah mulai dilaksanakan. Reformasi konstitusi juga dilakukan dengan memperkuat posisi lembaga-lembaga negara dan membatasi kekuasaan eksekutif. Meskipun begitu, dampak panjang dari sistem Orde Baru masih dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia.

Proses sejarah dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga runtuhnya Orde Baru merupakan cerminan dinamika ideologi Pancasila yang terus mengalami reinterpretasi sesuai dengan kebutuhan politik pada setiap masa. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi implementasinya bervariasi di setiap periode, dari Demokrasi Terpimpin yang sentralistik, Orde Baru yang otoritarian, hingga Reformasi yang lebih demokratis (Marwati, 2008).

SIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses panjang perumusan nilai-nilai fundamental yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Kajian historis menunjukkan bahwa pembentukan Pancasila melibatkan

berbagai pemikiran dan perdebatan intensif di antara para pendiri bangsa, terutama dalam sidang BPUPKI yang beranggotakan 69 orang dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan perempuan. Keberagaman anggota BPUPKI ini mencerminkan upaya untuk merepresentasikan seluruh elemen masyarakat Indonesia pada masa itu.

Dalam proses perumusannya, berbagai tokoh nasional memberikan sumbangsih pemikiran mengenai dasar negara. Muhammad Yamin, Soepomo, dan tokoh-tokoh lainnya telah mengemukakan pandangan mereka tentang pentingnya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial sebagai fundamen kenegaraan. Namun, Soekarno-lah yang berhasil merangkum dan merumuskan kelima nilai tersebut secara sistematis dan koheren dalam pidatonya yang monumental pada 1 Juni 1945, setelah melalui proses perenungan mendalam tentang sejarah dan jiwa bangsa Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila memiliki makna dan fungsi yang saling melengkapi. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual yang mengakui keberagaman agama dan kepercayaan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan universal. Persatuan Indonesia menjadi penguat integrasi nasional di tengah keberagaman. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mencerminkan sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjamin pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

Sebagai ideologi negara, Pancasila telah membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah, mulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa dan panduan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Di era globalisasi yang ditandai dengan penetrasi nilai-nilai asing dan dinamika sosial yang kompleks, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan filosofi Pancasila menjadi semakin krusial untuk menjaga integritas dan identitas nasional Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, kajian tentang sejarah Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang historis, proses perumusan, dan nilai-nilai fundamental Pancasila akan membantu memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme. Hal ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan masa depan sambil tetap mempertahankan jati diri bangsa yang beragam namun bersatu dalam bingkai Pancasila.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian sejarah Pancasila tidak hanya penting sebagai pengetahuan historis, tetapi juga sebagai fondasi untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah Pancasila akan membantu masyarakat Indonesia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat mewujudkan cita-cita nasional dalam membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoened, M. P. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 Zaman Jepang & Zaman Republik.pdf*.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna.pdf*. GRAMEDIA.
<https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Taufiqurrahman. (2018). *Pendidikan Pancasila*.
- Halking. (2024). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi (Panduan Pembelajaran Mata Kuliah)*. Medan: Unimed Publisher
- Kaelan, H. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Abdillah, L. A., Hs, S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, W., Prasetyo, A. H., Sinambela, S., Mansur, M., Aulia, T. Z., & Others. (2021). *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Penerbit Insania. <https://Books.Google.Co.Id/Books?>

- Id=Dsy5eaaaqbaj
- Assingkily, M. S., Fauzi, M. R., Hardiyati, M., & Saktiani, S. (N.D.). *Desain Pembelajaran Tematik Integratif Jenjang Mi/Sd (Dari Konvensional Menuju Kontekstual Yang Fungsional)*. Penerbit K-Media. <https://books.google.co.id/books?id=Sky6eaaaqbaj>
- Borashkyzy, A. U., Amina, A., Eshtayevna, S. Z., Userkhanovna, K. K., Myktybaevna, D. D., & Issaevna, B. A. (2020). The Evaluation Of Primary School Teacher Role On Research Activities. *International Journal Of Cognitive Research In Science, Engineering And Education*, 8(3), 29–38. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-3-29-38>
- Cecep Kustandi, M. P., & Dr. Daddy Darmawan, M. S. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran Bagi Pendidik Di Sekolah Dan Masyarakat*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=Cctydwaaqbj>